



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2026
#GROWSTRONGER

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I 2026



DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI ARMADA

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA) Triwulan I Tahun 2026. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat, sekaligus perwujudan akuntabilitas publik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Disusun secara objektif, LKj ini diharapkan menjadi sarana evaluasi yang efektif sekaligus pendorong untuk peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi, Direktorat POA menerapkan manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) dan *Logical Framework* sebagai kerangka strategis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Fokus pelaksanaan program selama Triwulan I Tahun 2026 mencakup lima bidang utama:

1. Pengembangan infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP);
2. Operasional pusat pengendalian;
3. Penyediaan logistik dan pengawasan kapal pengawas;
4. Operasional armada pengawasan;
5. Perawatan dan pemeliharaan kapal pengawas.
6. Pelayanan Sistem Pemantauan Kapal Pengawas

Kita patut bersyukur, karena berbagai indikator kinerja strategis berhasil dicapai secara optimal, khususnya dalam mendukung kinerja Eselon I serta prioritas kementerian. Hal ini tidak terlepas dari sinergi seluruh jajaran, baik di pusat maupun di lapangan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan hari ini adalah hasil dari kerja keras kolektif, dan tantangan ke depan memerlukan komitmen yang lebih besar. Oleh karena itu, laporan ini juga kami posisikan sebagai dasar refleksi dan rujukan dalam proses perbaikan berkelanjutan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian kinerja Direktorat POA. Semoga, laporan ini dapat menjadi dokumen yang bermanfaat dalam mendorong terciptanya birokrasi yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Jakarta, April 2026
Direktur Pengendalian Operasi Armada



Teuku Elvitrysyah S.H., M.M. 

Tim Penyusun

Penanggungjawab

Direktur Pengendalian Operasi Armada

Koordinator Pelaporan Direktorat POA

1. Ikrom Bungsu, S.Pi
2. Vandra Anggriawan, SH

Kontributor Pelaporan Direktorat POA

1. Davianda Bagus Hendaru, ST
2. Zuleha Ernas, S.Si, M.Si
3. Noval Reza Jaya, A.Md
4. Wiwin Herwina, A.Md
5. Rachmat Sofyan, S.St.Pi
6. Retno Wijayanti, S.Kom

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Tim Penyusun	4
Daftar Tabel	6
Daftar Gambar	7
Daftar Lampiran	8
Ringkasan Eksekutif	9
BAB I	13
Pendahuluan	13
Latar Belakang	14
Maksud dan Tujuan	15
Isu Strategis Tahun 2025-2029	16
Tugas dan Fungsi Direktorat POA	17
Sistematika Penyajian	19
BAB II	20
Perencanaan Kinerja	20
RENSTRA DITJEN PSDKP TAHUN 2020-2024	21
Perjanjian Kinerja Dit. POA	24
ALOKASI ANGGARAN	27
BAB III	28
Akuntabilitas Kinerja	28
Pengukuran Capaian Kinerja	29
Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	31
Realisasi Anggaran	74
BAB IV	77
Penutup	77
A. 70	
B. 70	
LAMPIRAN	79

Daftar Tabel

Tabel 1. Target dan realisasi capaian kinerja Dit. POA TW III 2024	10
Tabel 2. Target dan Realisasi IKU-1 TW III Tahun 2026	33
Tabel 3. Target dan Realisasi IKU-2 TW III Tahun 2026	34
Tabel 4. Komponen Perhitungan IKU 2	35
Tabel 5. Rincian analisis pelanggaran periode Januari sd Juni 2025	35
Tabel 6. Pemantauan Kapal di Kawasan Konservasi Januari-Juni 2025	36
Tabel 7. Daftar Keaktifan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Juni 2025	39
Tabel 8.. Target dan Realisasi IKU 3 Periode TW III Tahun 2025	40
Tabel 9. Target dan Realisasi IKU 4 Periode TW III Tahun 2025	42
Tabel 10. Target dan Realisasi IKU 5 Periode TW III Tahun 2025	43
Tabel 11. Rincian capaian IKU 6 Direktorat POA TW III Tahun 2025	46
Tabel 12. Hasil Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Ditjen PSDKP sampai dengan TW III Tahun 2025	47
Tabel 13. Target dan Realisasi IKU 7 Periode TW III Tahun 2025	48
Tabel 14. Target dan Realisasi IKU 7 Periode TW III Tahun 2025	48
Tabel 15. Target dan Realisasi IKU 8 Periode TW III Tahun 2025	50
Tabel 16. Target dan Realisasi IKU 9 Periode TW III Tahun 2025	51
Tabel 17. Target dan Realisasi IKU 10 Periode TW III Tahun 2025	52
Tabel 18. Target dan Realisasi IKU 11 Periode TW III Tahun 2025	53
Tabel 19. Hasil Penilaian (Survey) BKI Pada Tahun 2025	54
Tabel 20. Target dan realisasi IKU-12 periode Tahun 2025	55
Tabel 21. Rincian Pembangunan Prasarana di UPT	56
Tabel 22. Target dan realisasi IKU-13 periode TW III Tahun 2025	57
Tabel 23. Target dan realisasi IKU 14 periode Tahun 2025	58
Tabel 24. Target dan realisasi IKU-15 periode TW III Tahun 2025	59
Tabel 25. Target dan Realisasi IKU 16 Periode TW III Tahun 2025	61
Tabel 26. Target dan Realisasi IKU-17 Periode TW III Tahun 2025	62
Tabel 27. Target dan realisasi IKU 18 periode TW III Tahun 2025	63
Tabel 28. Target dan realisasi IKU 19 periode TW III Tahun 2025	64
Tabel 30. Rincian target dan realisasi IKU-20 periode TW III Tahun 2025	65
Tabel 31. Target dan realisasi IKU 21 periode TW III Tahun 2025	67
Tabel 32. Target dan realisasi IKU 22 periode TW III Tahun 2025	68
Tabel 33. Target dan realisasi IKU 23 periode TW III Tahun 2025	70
Tabel 34. Target dan realisasi IKU-24 periode TW III Tahun 2025	71
Tabel 35. Target dan realisasi IKU-24 periode TW III Tahun 2025	72
Tabel 36. Target dan realisasi IKU-26 periode TW III Tahun 2025	73
Tabel 37. Rekap Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA TW III Tahun 2025	74

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat POA	17
Gambar 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	24
Gambar 3 Tangkapan Layar Capaian Kinerja Direktorat POA Tahun 2025	29
Gambar 4. Komponen nilai supervisi pembinaan Pokmaswas	32
Gambar 5 Tangkapan Layar Aplikasi Si Susan	41
Gambar 6 Ilustrasi Operasi Pesawat Patroli	44
Gambar 7 Kegiatan Menghentikan, Memeriksa dan Menahan (henrikhan) oleh Kapal Pengawas	47
Gambar 8. Pengisian Bahan Bakar Minyak KP Hiu Macan Tutul 02	49

Daftar Lampiran

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	80
Lampiran 2	Rincian Hasil Operasi Pesawat Patroli	83
Lampiran 3	Daftar kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas	87

Ringkasan Eksekutif

Sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA) telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2026. Laporan ini merefleksikan komitmen Direktorat POA terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Peta Strategis Direktorat POA Tahun 2026, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tahun 2025–2029.

Sejalan dengan upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA) menetapkan 4 sasaran kegiatan dan 17 indikator kinerja (IK) sebagai tolok ukur pelaksanaan program. Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian kinerja Direktorat POA mencapai 108,26%.

Dalam aspek pelaksanaan anggaran, Direktorat POA telah merealisasikan 7 Rincian Output (RO) sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2026. Adapun pagu anggaran Direktorat POA ditetapkan sebesar Rp 301.623.888.000,00 (tiga ratus satu miliar enam ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Realisasi anggaran Direktorat POA pada TW I Tahun Tahun 2026 sebesar Rp. 44.283.415.159,00 (empat puluh empat miliar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) atau sebesar 14,68% dari Pagu anggaran.

Dalam merealisasikan anggaran, Direktorat POA mengacu pada prinsip *budget follow program* secara efektif dan efisien. Artinya, setiap anggaran yang dikeluarkan harus mendukung pencapaian indikator kinerja lingkup Direktorat POA. Adapun dalam meningkatkan pencapaian kinerja organisasi serta memastikan setiap indikator kinerja tercapai sesuai target yang ditetapkan, Direktorat Pengendalian Operasi Armada senantiasa melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin sehingga berbagai kendala dalam pencapaian kinerja dan tindaklanjutnya dapat diantisipasi dan disiapkan mitigasinya.

Realisasi pencapaian indikator kinerja Direktorat POA periode TW I Tahun 2026, ditabulasikan pada Tabel 1 berikut:

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	1	Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI (%)	100
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (indeks)	83
2	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	3	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	93
		4	Indeks operasi pesawat patroli (indeks)	95,25
		5	Indeks Kepuasan Penyediaan Logistik Armada Pengawasan (indeks)	100
		6	Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (indeks)	80
		7	Persentase Ketersediaan Personil Armada Pengawasan (%)	77,5
		8	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Armada Pengawasan SDKP (indeks)	100
		9	Persentase Armada Pengawasan SDKP yang Disupervisi perawatannya (%)	83
3	Terselenggaranya Penyusunan NSPK Bidang Operasi Armada dan Peningkatan Prasarana dan Sarana PSDKP	10	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP (%)	100
4	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	11	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat POA (indeks)	81,5
		12	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat POA (nilai)	88,2
		13	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Direktorat POA (%)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		14	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	86
		15	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat POA (nilai)	81
		16	Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat POA (Nilai)	78
		17	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	71



BAB 1.

Latar Belakang

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memegang peran strategis dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Melalui fungsi pengawasan, pemerintah memastikan bahwa setiap pelaku usaha mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ini.

Seiring penguatan tata kelola, pilar pengawasan kini semakin kokoh dengan kewenangan yang mencakup pemantauan dan pengawasan, penegakan hukum, serta pemberian sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan. Dengan cakupan wewenang yang komprehensif tersebut, sistem pengawasan menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan sumber daya laut Indonesia.

Keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tidak lepas dari sinergi dan kinerja optimal berbagai direktorat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP. Di antara jajaran tersebut, Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA) menempati posisi yang sangat strategis. Dengan mandat besar mencakup penyediaan sarana dan prasarana pengawasan, penyiapan logistik dan operasi kapal pengawas, hingga pengoperasian armada laut dan udara serta pemeliharaan pusat kendali, peran Direktorat POA menjadi poros penting dalam mendukung efektivitas pengawasan di lapangan.

Untuk menjalankan tugas besar tersebut secara andal, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien, Direktorat POA menerapkan manajemen kinerja yang komprehensif. Proses ini melibatkan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terukur, serta evaluasi menyeluruh terhadap hasil kerja yang dicapai. Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan tata kelola yang baik, Direktorat POA juga diwajibkan untuk menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran atas hasilnya.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Direktorat POA telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2026. Dokumen ini tidak hanya menyajikan capaian kinerja selama periode berjalan, tetapi juga menjadi instrumen evaluatif yang berharga sebagai bahan refleksi untuk perbaikan berkelanjutan sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Direktorat POA periode Triwulan I Tahun 2026 disusun dengan tujuan yaitu:

1

Penyampaian pertanggungjawaban kinerja Direktorat POA kepada seluruh stakeholder dan masyarakat kelautan dan perikanan.

2

Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Direktorat POA sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Tantangan Pengawasan Tahun 2026

Isu strategis yang menjadi tantangan Direktorat POA dalam pengendalian operasi armada, antara lain:

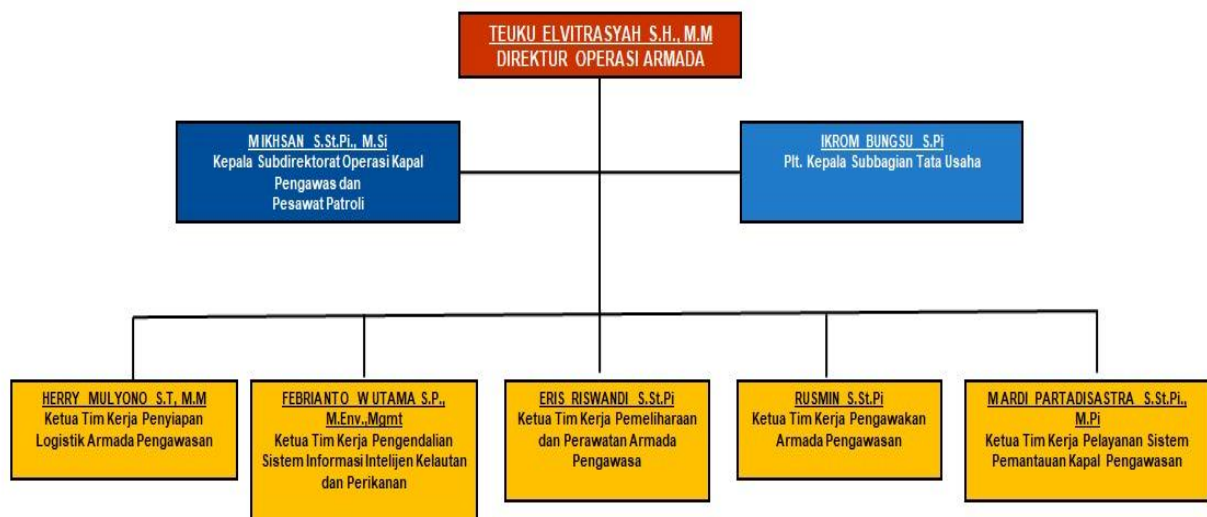
1. Praktik *IUU fishing* yang masih terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan tidak sesuai ketentuan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII). Praktik penangkapan ikan ilegal seringkali diikuti dengan aktifitas perbudakan (*slavery*) dan perdagangan orang (*people smuggling*) diperlukan koordinasi dan sinergitas dari semua pihak, antara lain: TNI-Angkatan Laut, POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan-Ditjen Hubla, Kementerian Kelautan dan Perikanan-Ditjen PSDKP, Kementerian Keuangan-Ditjen Bea Cukai, Badan Keamanan Laut (Bakamla).
2. Pemeriksaan terhadap pemanfaatan ruang laut, kawasan konservasi, pesisir pulau-pulau kecil, pengambilan pasir laut ilegal, dan pencemaran belum optimal dilakukan oleh kapal pengawas.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan baik berupa armada operasi (kapal pengawas dan speedboat) maupun prasarana perkantoran dan fasilitas penunjang operasi pengawasan SDKP lainnya yang masih jauh dari kondisi ideal. Modernisasi armada pengawasan juga menjadi kebutuhan, saat ini armada kapal pengawas 60% sudah berumur diatas 10 tahun dengan daya jelajah yang terbatas dan kemampuan serta kehandalan dalam melakukan pengawasan di laut juga sangat terbatas sehingga perlu untuk melakukan peremajaan kapal pengawas yang baru dan lebih modern.
4. Perkembangan harga BBM dunia terus mengalami kenaikan, kondisi ini mengakibatkan hari operasi kapal pengawas terkoreksi dan menjadi berkurang dari yang direncanakan sehingga dengan kemampuan frekuensi operasi kapal pengawas tersebut maka pengawasan dilaut perlu diintegrasikan dengan VMS atau dengan operasi udara.

Tugas dan Fungsi Direktorat POA

Tugas Utama Direktorat Pengendalian Operasi Armada diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan kebijakan, Penyusunan NSPK, Bimbingan Teknis, Supervisi serta evaluasi operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Hingga Triwulan I 2026, Direktorat POA dipimpin oleh seorang Direktur dengan dibantu oleh 6 (enam) Ketua Tim Kerja yaitu: (1) Tim Kerja Prasarana dan Sarana, (2) Tim Kerja Pengendalian Sistem Informasi dan Intelijen, (3) Pengawakan dan Logistik, (4) Pengoperasian Kapal Pengawas dan Pesawat Patroli (5) Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas, (6) Dukungan Manajerial. Struktur Organisasi sebagaimana Gambar 1.

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat POA



Adapun Direktorat Pengendalian Operasi Armada memiliki beberapa fungsi sebagai berikut

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, perencanaan, pengendalian penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, pengendalian, dan operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen, pemantauan dan evaluasi prasarana,

sarana, dan pengendalian armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas;

2. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, perencanaan, pengendalian penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, pengendalian, dan operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen, pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana, dan pengendalian armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas;
3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, perencanaan, pengendalian penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, pengendalian, dan operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen, pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana, dan pengendalian armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi, perencanaan, pengendalian penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawakan, penyiapan logistik, pengendalian, dan operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, pengendalian dan pelayanan sistem informasi intelijen, pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana, dan pengendalian armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas; dan
5. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengendalian Operasi Ar

Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Direktorat POA secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Direktorat POA, Ditjen. PSDKP tahun 2026 serta sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan rencana strategis Ditjen. PSDKP untuk periode 2025- 2029 dan perjanjian kinerja Direktorat POA tahun 2026.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan selama tahun 2026.

Bab VI Penutup

Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Direktorat POA, Ditjen. PSDKP periode Tahun 2026 dan merekomendasikan perbaikan kinerja di masa mendatang

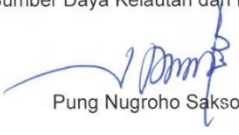
BAB 2.



Perjanjian Kinerja Dit. POA

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil pada tahun 2026, dibuat dokumen perjanjian kinerja sebagaimana terdapat pada lampiran 1. Adapun Rincian Indikator Kinerja yang menjadi target pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Gambar 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2026

	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346 LAMARAN www.kkp.go.id SUREL diti@npsd.kkp.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI ARMADA	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: Saiful Umam
Jabatan	: Direktur Pengendalian Operasi Armada
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA	
Nama	: Pung Nugroho Saksono
Jabatan	: Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.	
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Jakarta, 5 Januari 2026	
PIHAK KEDUA Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	PIHAK PERTAMA Direktur Pengendalian Operasi Armada
 Pung Nugroho Saksono	 Saiful Umam

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	1	Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI (%)	100
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (indeks)	83
2	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	3	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	93
		4	Indeks operasi pesawat patroli (indeks)	95,25
		5	Indeks Kepuasan Penyediaan Logistik Armada Pengawasan (indeks)	100
		6	Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (indeks)	80
		7	Persentase Ketersediaan Personil Armada Pengawasan (%)	77,5
		8	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (indeks)	100
		9	Persentase Armada Pengawasan SDKP yang Disupervisi perawatannya (%)	83
3	Terselenggaranya Penyusunan NSPK Bidang Operasi Armada dan Peningkatan Prasarana dan Sarana PSDKP	10	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP (%)	100
4	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	11	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Direktorat POA (indeks)	81,5
		12	Nilai PM SAKIP Satker lingkup Direktorat POA (nilai)	88,2
		13	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat POA (%)	100

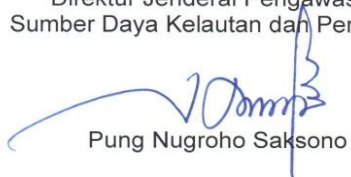
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		14	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	86
		15	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Direktorat POA (nilai)	81
		16	Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat POA (Nilai)	78
		17	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	71

Data anggaran:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	a. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	296.398.355.000
	b. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	3.941.606.000
2.	Program Dukungan Manajemen	1.283.927.000
TOTAL ANGGARAN		301.623.888.000

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

Pihak Pertama
Direktur Pengendalian Operasi Armada



Saiful Umam

ALOKASI ANGGARAN

Dalam mendukung Indikator Kinerja tersebut, dialokasikan anggaran dalam merealisasikan Rincian Output Lingkup Direktorat POA ditabulasikan sebagai berikut:

NO	RINCIAN OUTPUT	ANGGARAN (000)	VOLUME
2350. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP		296.398.355	
1	RCG. 001. Armada Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dirawat	34.962.148	10 Unit
2	QHD. 001 Operasi Kapal Pengawas (Hari Operasi)	169.809.930	90 Hari Operasi
3	QHD. 002. Operasi Pesawat Patroli (Hari Operasi)	82.030.299	120 Hari Operasi
4	BHD.001 Operasional Pengawakan dan Logistik Kapal Pengawas	8.999.749.000	90 Hari Operasi
5	BHD. 003 Operasional Tim Pesawat Patroli	2.417.157.000	120 Hari Operasi
6	AEB.001 Forum Operasi Pengawasan serta Intelijen Kelautan dan Perikanan	120.191.000	2 Kegiatan
7	FAE.01 Penjaminan Kualitas Pelaksanaan Operasi Armada	422.830.000	
8	AFA. 001. NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	53.208.000	1 NSPK
2352. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		3.941.606.000	
9	RDS. 001. Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	3.465.766.000	1 Unit
8	ACA. 001 Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	475.840.000	2.258 Produk
10	2355.CAN.001 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	7.500.000	
11	2355.EBA.962 Layanan Umum Rumah Tangga Direktorat POA	80.484.000	1
12	2355.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat POA	1.165.943.000	
13	2355.EBB.951 Layanan Sarana Internal	30.000.000	3
TOTAL PAGU		301.623.888.000	

BAB 3.



Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Direktorat POA TW I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh nilai capaian kinerja Direktorat POA sebesar 108,26% dengan capaian indikator Nilai Kinerja Organisasi (NKO) berwarna HIJAU dengan kategori BAIK. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana disajikan pada tabel Capaian Kinerja Organisasi berikut:

Gambar 3 Tangkapan Layar Capaian Kinerja Direktorat POA Triwulan I Tahun 2026

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

e-Kinerja Home

Selasa, 14 April 2026

NKO Maret - 2026

Unit Kerja : DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI ARMADA

Skor Kinerja : 108.26

Download

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✗, salinkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol
- Jika masih ada data dukung lama, data dukung masih tetap ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2026	Target Maret	Capaian Maret	%	Target s/d Maret	Capaian s/d Maret	%	Tgl Input
SK.01	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi						106.48			106.48		
IK.01	Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI	%	Stabilize	Nilai Posisi Aktif	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	14-Apr-2026 10:01
	Tambah Data Dukung											
IK.02	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	Indeks	Maximize	Rata-rata	83.00	83.00	93.71	112.90	83.00	93.71	112.90	14-Apr-2026 10:01
	Tambah Data Dukung											
SK.02	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif						108.67			108.67		
IK.03	Indeks operasi kapal pengawas	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Aktif	92.50	89.00	91.27	102.56	89.00	91.27	102.56	14-Apr-2026 10:01
	Tambah Data Dukung											
IK.04	Indeks operasi pesawat patroli	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Aktif	95.25	70.00	76.78	112.54	70.00	76.78	112.54	14-Apr-2026 10:01
	Tambah Data Dukung											
IK.05	Indeks Kepuasan Penyediaan Logistik Armada Pengawasan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Aktif	100.00	0.00			0.00	0.00		14-Apr-2026 10:01
	Tambah Data Dukung											
IK.06	Indeks Kesiapan Awak Kapal	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Aktif	80.00	0.00			0.00	0.00		14-Apr-2026 10:01
	Tambah Data Dukung											
IK.07	Persentase Ketersediaan Personel Armada Pengawasan	%	Maximize	Nilai Posisi Aktif	77.50	77.50	84.20	108.65	77.50	84.20	108.65	14-Apr-2026 10:01
	Tambah Data Dukung											
IK.08	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Armada Pengawasan SDKP	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Aktif	100.00	0.00			0.00	0.00		14-Apr-2026 10:01
	Tambah Data Dukung											
IK.09	Persentase Armada Pengawasan SDKP yang Diservisi perawatannya	%	Maximize	Nilai Posisi Aktif	83.00	0.00			0.00	0.00		14-Apr-2026 10:01
	Tambah Data Dukung											
SK.03	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Operasi Armada dan Peningkatan Prasarana dan Sarana PSDKP											
IK.10	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	%	Maximize	Nilai Posisi Aktif	100.00	0.00			0.00	0.00		14-Apr-2026 10:01
	Tambah Data Dukung											
SK.04	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan						109.77			109.77		
IK.11	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat POA	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Aktif	61.50	0.00			0.00	0.00		14-Apr-2026 10:01
	Tambah Data Dukung											
IK.12	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat POA	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Aktif	66.20	0.00			0.00	0.00		14-Apr-2026 10:01
	Tambah Data Dukung											
IK.13	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Direktorat POA	%	Maximize	Nilai Posisi Aktif	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	14-Apr-2026 10:01
	Tambah Data Dukung											
IK.14	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	%	Maximize	Rata-rata	86.00	86.00	100.00	116.28	86.00	100.00	116.28	14-Apr-2026 10:01
	Tambah Data Dukung											
IK.15	Nilai Pengawasan Keanggotaan Internal Direktorat POA	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Aktif	61.00	0.00			0.00	0.00		14-Apr-2026 10:01
	Tambah Data Dukung											
IK.16	Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Direktorat POA	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Aktif	76.00	0.00			0.00	0.00		14-Apr-2026 10:01
	Tambah Data Dukung											
IK.17	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Aktif	71.00	0.00			0.00	0.00		14-Apr-2026 10:01
	Tambah Data Dukung											

Tutup

Sumber: *kinerjaku.KKP.go.id*, April 2026

[illegible]

Berdasarkan tabel di atas, target untuk IKU 1 pada TW I dapat dicapai secara maksimal. Capaian pada periode triwulan I tahun 2026 sama dengan capaian pada triwulan sebelumnya, yaitu sebesar 100%, sehingga target dapat tercapai sepenuhnya. Adapun capaian dimaksud diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Formulasi rumus perhitungan capaian Cakupan WPPNRI

$$x = (x_1/x_2) \times 100\%$$

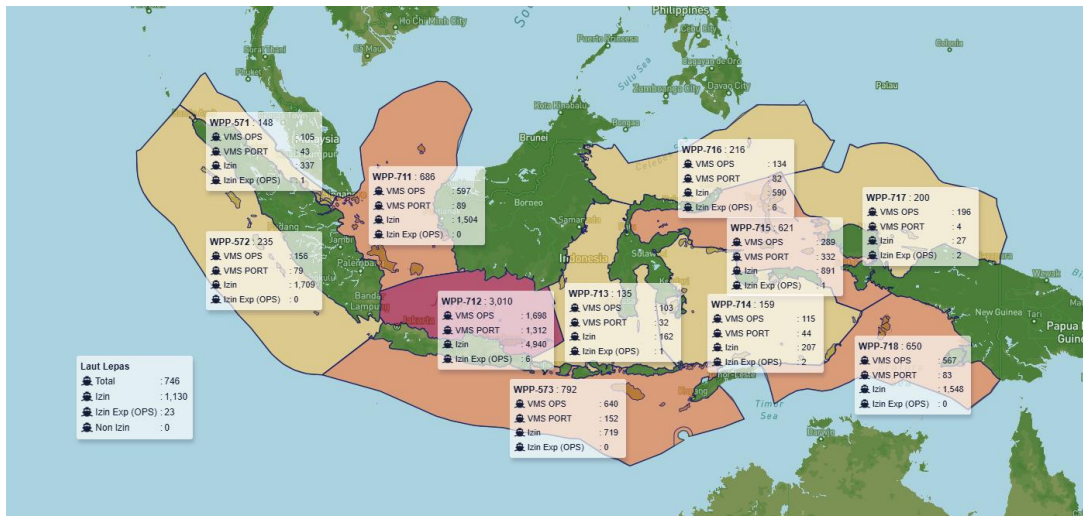
Keterangan:

X = Persentase cakupan WPPNRI yang terpantau dan terdapat pemanfaatan SDKP (%)

X₁= Jumlah WPPNRI yang terpantau menggunakan teknologi pemantauan dari kegiatan pemanfaatan SDKP

Perhitungan IKU 1 Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI

No	WPP	Bulan			Perhitungan (%)
		Jan	Feb	Mar	
1	WPPNRI 571	1	1	1	100
2	WPPNRI 572	1	1	1	100
3	WPPNRI 573	1	1	1	100
4	WPPNRI 711	1	1	1	100
5	WPPNRI 712	1	1	1	100
6	WPPNRI 713	1	1	1	100
7	WPPNRI 714	1	1	1	100
8	WPPNRI 715	1	1	1	100
9	WPPNRI 716	1	1	1	100
10	WPPNRI 717	1	1	1	100
11	WPPNRI 718	1	1	1	100
PERSENTASE					100
					100
					100%



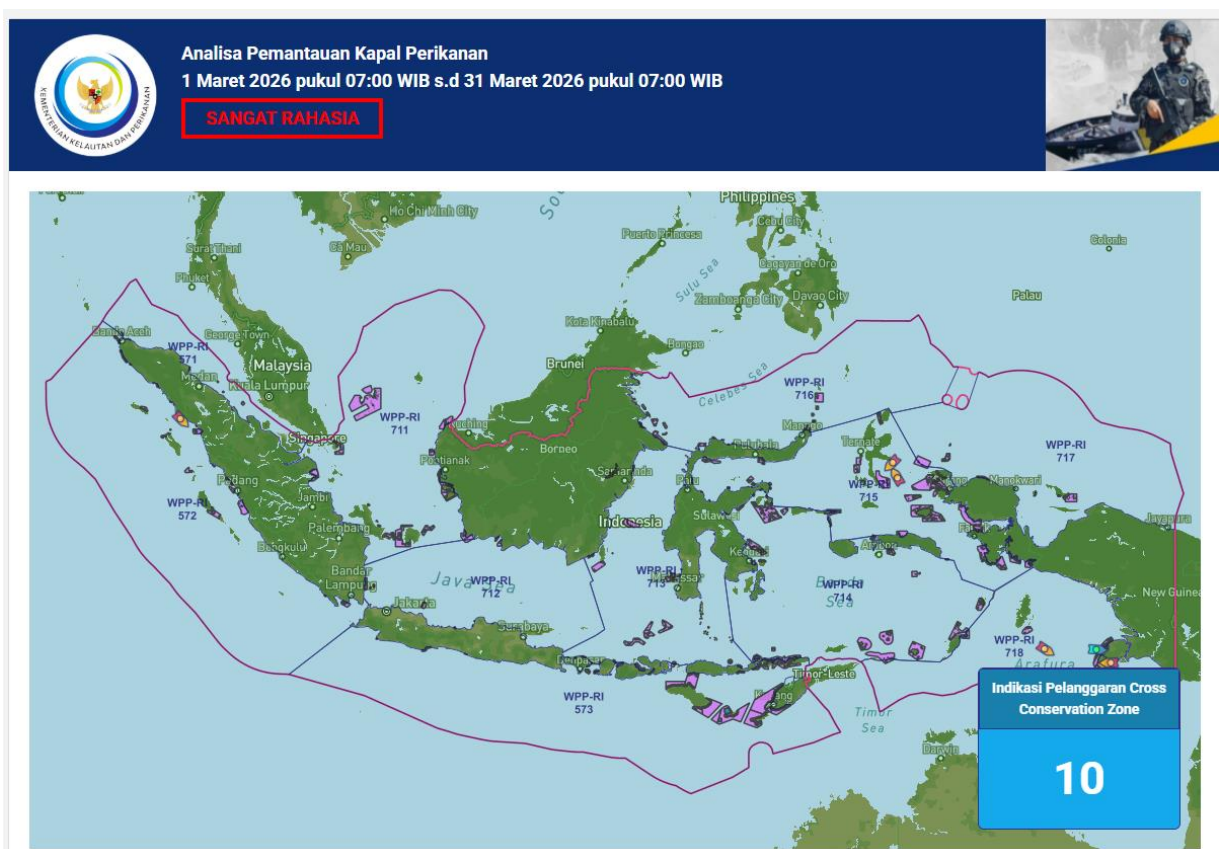
Gambar. Sebaran Kapal Perikanan yang memasang transmiter SPKP



Gambar. Pantauan Kapal Perikanan yang terpantau SPKP di WPP 571



Gambar. Pantauan kapal perikanan yang terpantau AIS di WPP 712



Gambar. Pantauan pada kawasan konservasi

2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan)

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengisian kuesioner Sistem Kepuasan Masyarakat Layanan SPKP menggunakan *digital form* pada *tools* Survei Kepuasan (Aplikasi SUSAN) KKP, dimana hasil penilaian pengguna SPKP langsung diolah secara otomatis pada Aplikasi SUSAN. Aplikasi SUSAN KKP merupakan aplikasi yang dibangun oleh Pusdatin KKP dalam rangka untuk membantu pengambilan responden dan menghitung nilai SKM yang sesuai dengan Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan terdiri dari indikator kuantitatif, yakni:

1. Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)

Layanan penerbitan dokumen digital yang menyatakan bahwa transmitter SPKP pada kapal perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan dan dapat dipantau pada pusat pemantauan kapal perikanan.

2. Pemberian Akses Pemantauan Kapal Perikanan

Dengan adanya inovasi pengajuan secara mandiri, secara otomatis Pengguna akan mendapatkan akses untuk mengajukan layanan penerbitan SKAT sekaligus dapat memantau kapal perikanan miliknya.

3. Persetujuan Penyedia Transmitter

Layanan pemberian persetujuan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada perusahaan tertentu sebagai penyedia transmitter SPKP, sehingga Perusahaan tersebut dapat menyediakan dan memasang transmitter SPKP di kapal perikanan

Tabel 13. Target dan Realisasi IKU 2 Periode TW I Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			CAPAIAN 2026			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan)	80	93,75	117,19	81	96,34	118,94 %	82	95,35	116,28%	83	93.71	112.9	86	-	-

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian pada Tahun 2026 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 93,71 dari target sebesar 83 sehingga persentase capaian sebesar 112,90%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2025, terdapat selisih/depresiasi sebesar 3.38%. Hal ini disebabkan pada triwulan II tahun 2025 dilakukan inovasi pelayanan SPKP melalui aplikasi SALMON Kilat dimana penerbitan layanan SPKP semakin mudah dan cepat, namun perlu dilakukan sosialisasi kepada pengguna layanan terkait penggunaan aplikasi SALMON Kilat tersebut, sehingga perlu dilakukan publikasi terkait mekanisme dan panduan penggunaan SALMON Kilat.

Potret hasil survei kepuasan masyarakat periode TW I Tahun 2026 berdasarkan Aplikasi SUSAN KKP sebagai berikut :

The screenshot shows the 'Laporan SKM Detail' page in the SUSAN KKP application. The page has a sidebar on the left with navigation links: Dashboard, Mapping Data, and Laporan. The main content area displays a table of survey results for the year 2026, Triwulan 1. The table has the following columns: Kd Es1, Nama UPP, Tahun, Tw, Rating, Nilai IKM, and Jml Responden. The data row shows a rating of 4.91 and a value of 93.71 for IKM. The page also features a top navigation bar with the title 'Susan KKP' and a user profile dropdown.

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Jml Responden
psdkp	Direktorat Pengendalian Operasi Armada	2026	1	4.91	93.71	234

Gambar 5 Tangkapan Layar Aplikasi SUSAN KKP

Keberhasilan capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP serta peningkatan kinerja pada triwulan I 2026 dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan SPKP sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan
2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan SPKP;
3. Adanya monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat.

Alokasi anggaran Tahun 2026 untuk mendukung tercapainya IKU 2 ini sebesar Rp. 495.140.000,00 dan sampai dengan TW I tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp 2.100.000,00 atau 0,42% dari alokasi anggaran.

SASARAN KEGIATAN 2

TERSELENGGARANYA OPERASI ARMADA PENGAWASAN SDKP SECARA EFEKTIF

3. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan armada kapal pengawas. Indeks Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

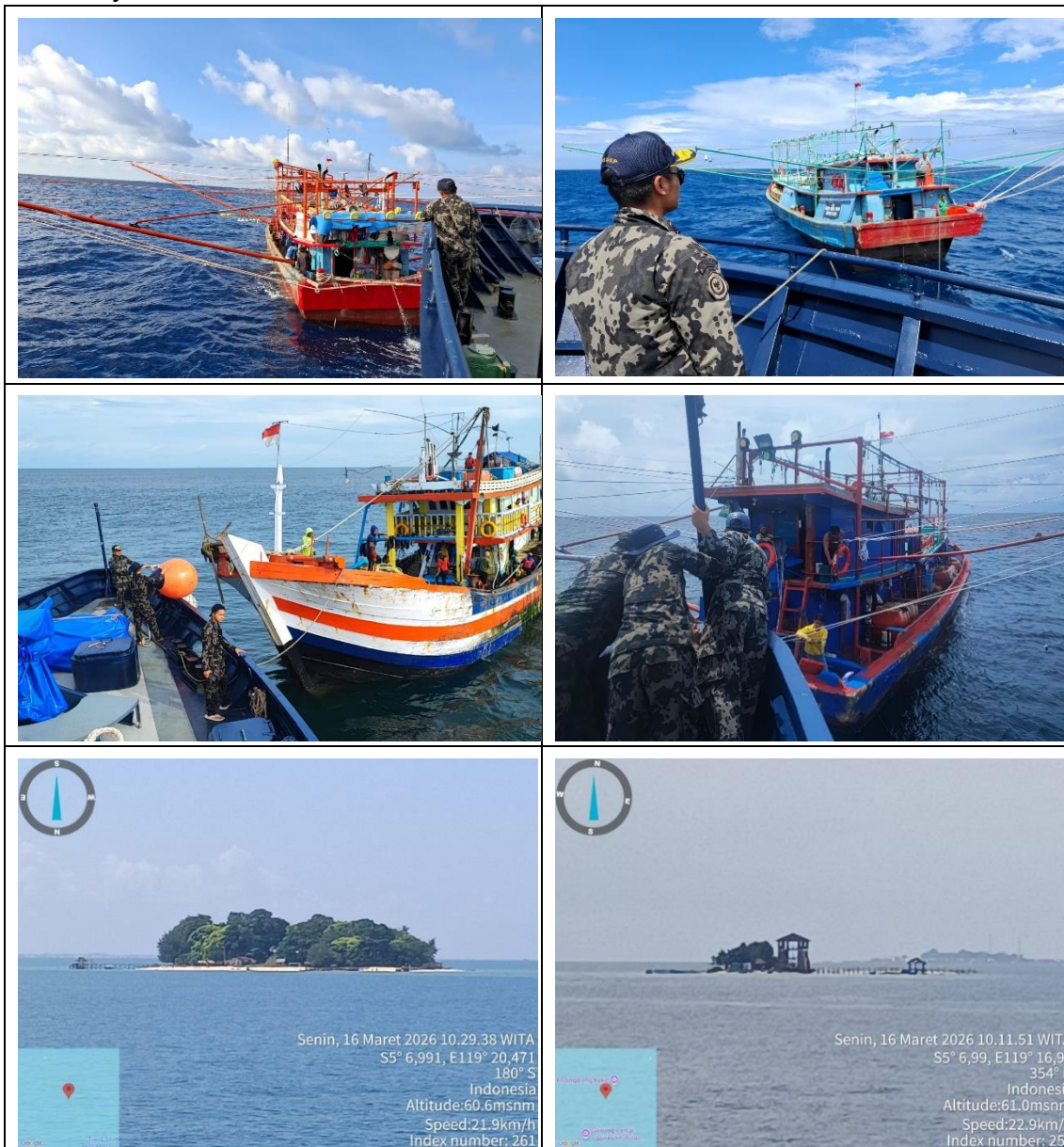
1. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan kelautan;
2. Cakupan wilayah pengawasan;
3. Hasil dan Tindak Lanjut Operasi yang terdiri dari Tangkapan Kapal Pengawas, Pemutusan Rumpon, dan/atau Sita Alkap;
4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Dukungan Operasi Bersama, dan/atau Terkoordinasi, Dukungan Kegiatan SAR dan/atau Kemanusiaan, dan Dukungan Program Kegiatan Kementerian dalam Sinergi Pengawasan Kelautan dan Perikanan.

Tabel 15. Rincian capaian IKU 3 Direktorat POA TW I Tahun 2026

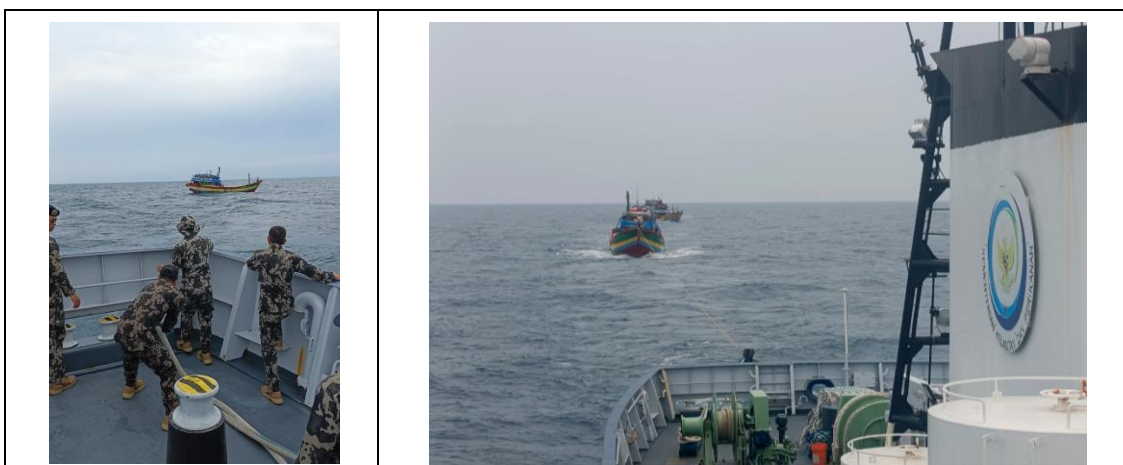
INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			CAPAIAN 2026			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	87,6	96,19	109,8%	70	95,12	135,8%	-	-	-	89	91,27	102,55%	93	-	-

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi Indeks Kinerja Utama (IKU) tercatat sebesar 91,27, melampaui target triwulan sebesar 89 dengan tingkat capaian 102,55%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan pada awal tahun tetap berjalan dengan baik dan mampu memenuhi target yang telah ditetapkan, meskipun dihadapkan pada berbagai dinamika operasional. IKU ini tidak dapat dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2025 perhitungan capaian dilakukan secara tahunan sedangkan ditahun 2026 perhitungan capaian dilakukan secara Triwulan.

Jika dibandingkan dengan target Renstra sebesar 93, capaian Triwulan I Tahun 2026 terpenuhi. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pada awal tahun masih berada dalam koridor yang mendukung pencapaian target tahunan, mengingat sifat capaian kinerja yang bersifat kumulatif dan akan terus berkembang seiring dengan peningkatan intensitas operasi pada triwulan berikutnya.



Gambar 8. Kegiatan Riksa Kapal Perikanan dan Objek Kelautan oleh Kapal Pengawas



Gambar 8. Kegiatan Dukungan Operasi Lainnya Dalam Operasi Misi SAR

Sampai dengan periode Triwulan I Tahun 2026, Kapal Pengawas telah melaksanakan kegiatan operasi pengawasan selama 136 hari operasi atau sebesar 14 hari rata-rata yang melibatkan 9 unit Kapal Pengawas. Dalam pelaksanaan operasi tersebut, Kapal Pengawas melakukan pemeriksaan terhadap 414 kapal (KII). Intensitas pemeriksaan antar kapal pengawas bervariasi, dengan kontribusi pemeriksaan terbesar berasal dari KP. ORCA 05, KP. BARAKUDA 02, dan KP. ORCA 02, seiring dengan jumlah hari operasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan kapal lainnya.

Dari total pemeriksaan tersebut, Kapal Pengawas berhasil melakukan penangkapan terhadap 19 kapal, yang seluruhnya merupakan KII. Selain itu, kegiatan pengawasan juga mencakup pemeriksaan terhadap 35 objek sumber daya kelautan (SDK).

Tabel 16. Hasil Operasi Kapal Pengawas dibawah Kendali Direktorat Pengendalian Operasi sampai dengan TW I Tahun 2026

NO	NAMA KAPAL PENGAWAS	HARI OPS	DIPERIKSA			DITANGKAP			RIKSA OBJEK SDK	RUMPON
			KII	KIA	JML	KII	KIA	JML		
1	KP. ORCA 01	8	30	0	30	1	0	1	2	0
2	KP. ORCA 02	22	69	0	69	8	0	8	1	0
3	KP. ORCA 03	19	64	0	64	3	0	3	2	0
4	KP. ORCA 04	5	15	0	15	0	0	0	2	0
5	KP. ORCA 05	20	86	0	86	1	0	1	19	0
6	KP. ORCA 06	21	16	0	16	1	0	1	0	0
7	KP. BARAKUDA 01	12	38	0	38	0	0	0	0	0
8	KP. BARAKUDA 02	22	91	0	91	5	0	5	2	0
9	KP. AKAR BAHAR 01	7	5	0	5	0	0	0	7	0
		136	414	0	414	19	0	19	35	0

Dalam pelaksanaan operasi Kapal Pengawas TW I Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Penguatan tata kelola operasi melalui monitoring dan evaluasi (monev) berkelanjutan tetap menjadi faktor utama dalam menjaga ketercapaian IKU Indeks Operasi Kapal Pengawas. Pelaksanaan monev secara konsisten pada setiap akhir operasi memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana serta memungkinkan perbaikan berkelanjutan dalam setiap operasi.
2. Optimalisasi perencanaan operasi berbasis data dan informasi pengawasan mendukung pelaksanaan patroli yang lebih terarah dan efektif. Pemanfaatan data dari berbagai sumber memungkinkan penentuan prioritas wilayah dan target operasi secara lebih tepat, sehingga capaian kinerja tetap terjaga meskipun periode operasi pada awal tahun relatif terbatas.
3. Penyesuaian pelaksanaan operasi pada awal tahun akibat faktor kebijakan dan kondisi cuaca telah dikelola melalui optimalisasi kegiatan operasi pada periode berikutnya. Meskipun operasi efektif baru dimulai pada bulan Februari, armada mampu memaksimalkan hari operasi yang tersedia untuk menjaga capaian kinerja tetap sesuai target.
4. Kesiapan teknis armada dan pengelolaan kondisi kapal menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran operasi. Meskipun terdapat kendala teknis pada KP. ORCA 06 di akhir periode TW I, tidak mengganggu capaian kinerja secara keseluruhan. Namun Subdit Operasi perlu melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Tim Kerja pemeliharaan dan perawatan kapal untuk memastikan kesiapan operasional Kapal Pengawas dapat terpantau secara berkala.
5. Efisiensi operasional melalui pemanfaatan listrik darat (shore power) terus memberikan dampak positif terhadap penghematan penggunaan BBM. Langkah ini menjadi semakin penting dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga energi global, sehingga keberlanjutan operasi pengawasan tetap dapat terjaga.
6. Pelaksanaan dukungan operasi lainnya seperti misi SAR yang dilaksanakan oleh KP. ORCA 06 menunjukkan optimalisasi peran Kapal Pengawas sebagai aset negara. Kegiatan ini tetap memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja melalui pemenuhan variabel kinerja yang sifatnya kondisional.

Alokasi anggaran tahun 2026 untuk mendukung tercapainya IKU 3 ini Rp169.809.930.000,00 dan sampai dengan TW I Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp. 32.324.225.633,00 atau 19.04% dari total pagu.

4. Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli

Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan armada pesawat patroli udara. Indeks Kinerja Operasional Pesawat Patroli terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Cakupan Wilayah Pengawasan;
2. Kapal Perikanan yang Divalidasi;
3. Pemantauan Objek Kelautan seperti Wilayah Pesisir, Pulau- pulau kecil, dan Kawasan Konservasi;
4. Informasi Target Operasi yang diberikan ke Kapal Pengawas (Kendali Pusat & UPT);
5. Pelaksanaan Operasi di Wilayah WPPNRI yang Rawan dan IUUF yang tinggi KIA (WPPNRI 571, 711, 716, 717);
6. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap Patroli Operasi Bersama, dan/atau Terkoordinasi; dan
7. Dukungan kegiatan lainnya (Misi SAR, kemanusiaan, Dukungan Program Kegiatan Kementerian dalam Sinergi Pengawasan Kelautan dan Perikanan)

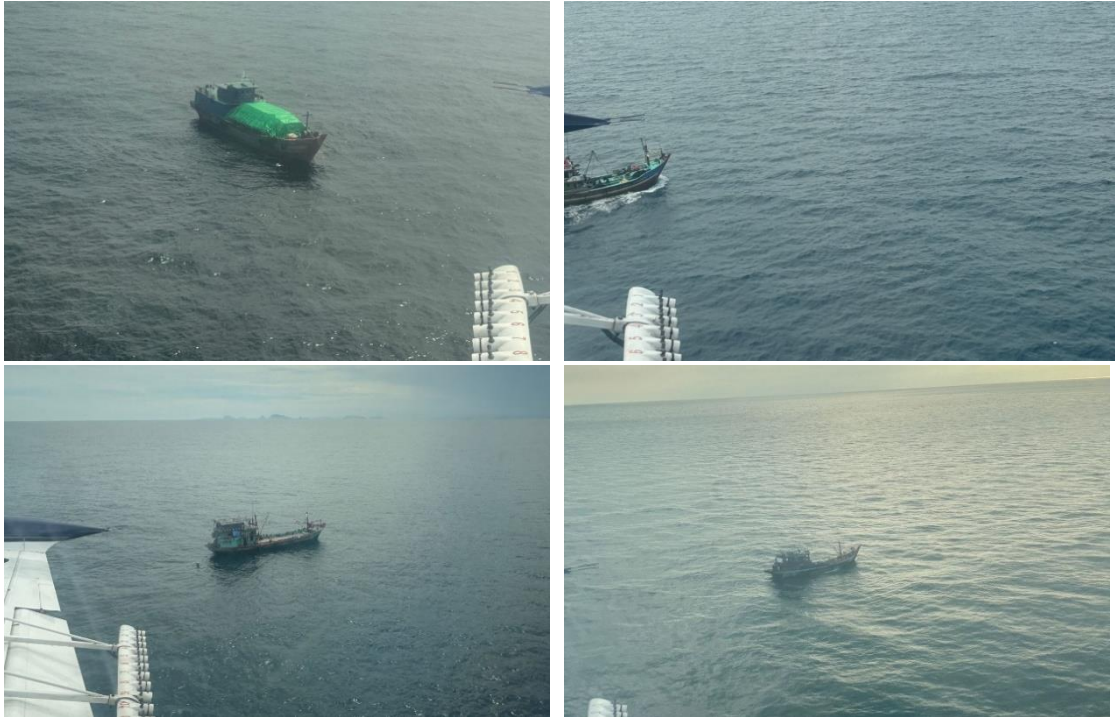
Tabel 17. Target dan Realisasi IKU 4 Periode TW I Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			CAPAIAN 2026			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli	93	98,53	106%	91	100	109,9%	90	94,92	105,47%	70	78,78	112,54%	96	-	-

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli tercatat sebesar 78,78, melampaui target triwulan I sebesar 70 dengan tingkat capaian 112,54%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan melalui patroli udara pada awal tahun tetap mampu memenuhi target yang telah ditetapkan, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan operasional dan kendala. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2025 sebesar 96,76, realisasi pada TW I Tahun 2026 terbilang lebih rendah, yang merupakan konsekuensi dari adanya insiden kecelakaan pesawat, penyesuaian pole operasi, serta kondisi operasional yang tidak sepenuhnya optimal pada awal tahun.

Jika dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2026 sebesar 96, capaian Triwulan I Tahun 2026 optimis tercapai. Kondisi ini mencerminkan bahwa

capaian awal tahun masih belum berada pada jalur target tahunan, namun tetap memiliki ruang untuk peningkatan pada triwulan berikutnya. Hal ini mengingat capaian kinerja bersifat kumulatif dan sangat dipengaruhi oleh intensitas operasi pada periode selanjutnya.



Gambar 9. Dokumentasi Kapal Perikanan yang Dipantau Oleh Operasi Pesawat Patroli





Gambar 9. Dokumentasi Kegiatan Dukungan Operasi Lainnya

Capaian kinerja yang masih minim pada Triwulan I Tahun 2026 dipengaruhi oleh beberapa kondisi strategis, antara lain adanya insiden kecelakaan pesawat patroli yang berdampak pada berkurangnya dukungan sarana dan hilangnya sebagian data hasil operasi, serta keterbatasan ketersediaan pesawat patroli yang bersifat dedicated. Selain itu, sebagian besar pelaksanaan operasi pada periode ini lebih berfokus pada dukungan terhadap operasi lainnya, sehingga kontribusi terhadap indikator utama menjadi terbatas. Di sisi lain, kondisi cuaca yang kurang mendukung di beberapa wilayah operasi turut mempengaruhi efektivitas pemantauan udara.

Selama periode operasi TW I Tahun 2026, pelaksanaan pengawasan SDKP melalui matra udara telah dilaksanakan sebanyak 7 periode operasi dengan total jumlah hari operasi sebanyak 24 hari operasi. Adapun hasil capaian operasi Pesawat Patroli sampai dengan TW I adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Capaian Pelaksanaan Operasi Pesawat Patroli sd. Triwulan I 2026

NO	PERIODE	WILAYAH OPERASI (WPPNRI)	HARI OPERASI
1	I	712	2
2	I-A	712, 713	3
3	I-B	571	2
4	I-C	713	5
5	II	573	3
6	II-A	712	4
7	III	711, 571	5
JUMLAH			24

Dalam pelaksanaan operasi Pesawat Patroli pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Insiden kecelakaan pesawat patroli ATR 42-500 PK-THT menjadi faktor yang mempengaruhi capaian kinerja operasi secara langsung. Kondisi ini

berdampak langsung terhadap keterbatasan pelaksanaan patroli dan kontribusi terhadap indikator kinerja, sehingga ke depan diperlukan langkah percepatan pemulihan kapasitas operasional, termasuk pemenuhan sarana dan SDM pendukung.

2. Akibat Insiden kecelakaan pesawat patroli, Keterbatasan ketersediaan pesawat patroli yang bersifat dedicated menjadi perhatian dalam menjaga keberlanjutan operasi pengawasan udara. Ketergantungan pada skema sewa dan kerja sama antar instansi menyebabkan fleksibilitas pelaksanaan operasi menjadi terbatas, sehingga diperlukan penguatan dukungan sarana udara yang lebih memadai dan berkelanjutan.
3. Optimalisasi perencanaan operasi berbasis prioritas wilayah dan coverage area perlu terus ditingkatkan. Penentuan wilayah operasi harus mempertimbangkan antara daerah rawan dan pencapaian indikator cakupan wilayah.
4. Pemanfaatan data dan informasi pengawasan secara terintegrasi menjadi kunci dalam menjaga efektivitas patroli udara. Dukungan Command Center dan sumber data lainnya memungkinkan pelaksanaan operasi tetap terarah dan berbasis risiko.
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) harus dilakukan untuk memastikan setiap kegiatan operasi memberikan kontribusi optimal terhadap capaian kinerja serta menjadi dasar perbaikan berkelanjutan pada periode berikutnya.
6. Sifat capaian kinerja yang kumulatif dan dinamis menjadi perhatian dalam pengelolaan kinerja Tahun 2026. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi pelaksanaan operasi serta dukungan sarana dan perencanaan yang optimal agar capaian kinerja pada triwulan berikutnya dapat meningkat dan mampu mencapai target Renstra pada akhir tahun.

Alokasi anggaran Tahun 2026 untuk mendukung pencapaian Indeks Kinerja Utama (IKU) pada kegiatan ini terdiri dari Pagu QHD 002 sebesar Rp82.030.299.000,00 dan Pagu BHD 003 sebesar Rp2.417.157.000,00. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, realisasi anggaran pada Pagu QHD 002 tercatat sebesar Rp8.694.056.849,00 atau 10,60%, sedangkan pada Pagu BHD 003 terealisasi sebesar Rp84.244.511,00 atau 3,49%.

5. Indeks Kepuasan Penyediaan Logistik Armada Pengawasan

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Penyediaan Logistik Armada Pengawasan digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas penyediaan logistik dalam mendukung operasional Armada Pengawasan SDKP.

Penilaian dilakukan terhadap aspek ketepatan waktu penyediaan, kesesuaian kebutuhan, kualitas barang/jasa, kemudahan koordinasi, serta responsivitas layanan pendukung.

Pengukuran dilakukan secara berkala setiap semester melalui survei terstruktur kepada unit pengguna Armada Pengawasan. Hasil survei diolah menjadi nilai indeks yang berfungsi sebagai alat evaluasi efektivitas dan efisiensi layanan, serta menjadi basis data untuk identifikasi kendala dan perbaikan layanan secara berkesinambungan.

Layanan logistik yang dinilai mencakup dua kategori besar yang krusial bagi keberlangsungan operasi di laut yakni:

- Logistik Kapal: Meliputi ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas.
- Logistik Personel: Meliputi Bahan Makanan (Natura), Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh (BPDT), Air Tawar, Biaya Delegasi, Jaga Sandar, hingga ketersediaan Amunisi Senjata Api.

Melalui pemantauan yang konsisten, diharapkan pemenuhan kebutuhan logistik ini dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan SDKP secara optimal. Adapun ringkasan capaian kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel Target dan Realisasi IKU 5 Periode Tahun 2025

No	Komponen	Target	Realisasi	%
	Kuisisioner dan Hasil Pengolahan Data Survei Kepuasan Penyediaan Logistik Armada Pengawasan (Indeks)	85	89,96	105,84
	Total Nilai	85	89,96	105,84

Keberhasilan melampaui target ini menunjukkan komitmen organisasi dalam menjaga kesiapan operasional armada Kapal Pengawas melalui manajemen logistik yang responsif.

Tabel Target dan Realisasi IKU 5 Periode TW I Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			CAPAIAN 2026			RENSTRA		
	T	R		T	R		T	R		T	R	%	T	R	%
Indeks Kepuasan Penyediaan Logistik Armada Pengawasan															

Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama di tahun sebelumnya dikarenakan indikator kinerja ini baru ditetapkan pada Triwulan IV pada tahun 2025.

6. Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas

Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (AKP) merupakan ukuran kesiapan ASN AKP (Kelas I – IV) berdasarkan kualifikasi pendidikan, sertifikat keahlian pelaut, sertifikat keterampilan pelaut, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (MCU), dan psikotest pemegang senjata api, dalam melaksanakan tugas sesuai jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara.

Berdasarkan data *Indeks Kesiapan Awak Kapal Negara (AKN)* TW IV tahun 2025, hasil analisa terhadap lima aspek utama yaitu pendidikan, keahlian, keterampilan kepelautan, hasil pemeriksaan kesehatan (MCU) dan jumlah pemegang kartu izin penguasaan pinjam pakai senjata (Pengpin) pada 377 Awak Kapal Negara Ditjen PSDKP yang berstatus PNS, menunjukkan gambaran umum kesiapan personel dalam mendukung operasi pengawasan laut. Dari sisi pendidikan, mayoritas AKN telah memenuhi kualifikasi minimum bidang kelautan/perikanan, yang mencerminkan kesiapan dasar dalam aspek akademik dan teknis dengan nilai 187. Hal ini menjadi pondasi penting dalam mendukung tugas-tugas strategis pengawasan sumber daya kelautan

Pada aspek keahlian dan keterampilan kepelautan, terlihat bahwa sebagian besar personel telah memiliki sertifikasi keahlian. Hal ini mencerminkan kompetensi yang cukup baik dalam penguasaan teknis operasional kapal dan pemahaman terhadap prosedur keamanan dan

keselamatan di laut dengan capaian nilai pada keahlian kepelautan 73 dan nilai keterampilan kepelautan 26,65. Namun demikian, masih terdapat disparitas atau perbedaan mencolok nilai antar individu yang mengindikasikan perlunya pemerataan dan peningkatan kualitas pelatihan dikarenakan adanya CPNS baru sejumlah 27 AKN.

Pada tahun 2025, capaian Indeks Kesiapan untuk aspek *Medical Check Up* (MCU) bagi Awak Kapal Negara pada 34 kapal tercatat mencapai nilai 35,9 dari target yang telah ditetapkan sebesar 37,7. Berdasarkan hasil tersebut, capaian ini dinilai belum mencapai target yang ditentukan dikarenakan adanya AKN yang melaksanakan tugas belajar yang tidak dapat melaksanakan MCU. Selisih capaian dengan target menunjukkan masih adanya faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh bagi seluruh Awak Kapal Negara.

Pemenuhan izin Kartu Penguasaan Pinjam Pakai Senjata (Pengpin) bagi Awak Kapal Negara (AKN) telah terlaksana secara optimal dengan capaian 100%, mencakup sebanyak 377 AKN. Seluruh AKN yang memiliki kewenangan penggunaan senjata dinas telah dilengkapi izin Pengpin sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga menjamin legalitas, keamanan, dan akuntabilitas dalam penguasaan serta penggunaan senjata. Capaian ini mencerminkan tertib administrasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta komitmen kuat dalam mendukung kesiapan operasional dan pengamanan tugas AKN secara profesional dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil pengumpulan data terhadap kondisi aktual awak kapal pengawas (AKP) pada semester II tahun 2025, Untuk nilai Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas pada semester II tahun 2025 adalah 98% melampaui target awal 80% yang sebelumnya tidak adanya kegiatan MCU dan pelatihan keterampilan kepelautan bagi AKN namun pada semester II ini kedua kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan adanya kebijakan pembukaan blokir/efisiensi anggaran tahun 2025. (data kesiapan AKN terlampir).

**CAPAIAN INDEKS KESIAPAN AWAK KAPAL NEGARA DITJEN PSDKP
TAHUN 2026**

NO	ITEM PENILAIAN	BOBOT PENGUKURAN CAPAIAN	CAPAIAN
1	Pendidikan	50,00	187,00
2	Sertifikat Keahlian Pelaut	25,00	73,00
3	Sertifikat Keterampilan Pelaut	10,00	26,65
4	Pemeriksaan Kesehatan (MCU)	5,00	35,90
5	Psikotest Pemegang Senjata Api	10,00	35,30
TOTAL CAPAIAN		100,00	98%

Rincian capaian IKU 6 Direktorat POA periode Semester I Tahun 2026 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 21. Target dan Realisasi IKU 6 Periode TW I Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			CAPAIAN 2026			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Target tahun 2026 untuk indeks kesiapan awak kapal pengawas adalah 80 dan dihitung pada saat akhir tahun 2026. Saat ini tim pengawakan sedang mengupayakan pelatihan keterampilan kepelautan guna mencapai Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas tahun 2026 ditengah penajaman anggaran oleh pemerintah, namun disatu sisi target sertifikasi sesuai dengan Keputusan Menteri PAN-RB tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana di lingkungan Aparatur Sipil Negara harus tetap berjalan.

7. Persentase ketersediaan Personil Armada Pengawasan

Berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran AKP pada Triwulan I tahun 2026, tercatat bahwa seluruh kapal pengawas (34 Kapal Pengawas) yang beroperasi di bawah koordinasi Ditjen PSDKP memiliki persentase ketersediaan personil armada pengawasan sebesar 84,2% dikarenakan ada AKP yang melaksanakan tugas belajar dan melaksanakan latihan dasar CPNS pada saat kapal melaksanakan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Artinya, tidak semua formasi personel di masing-masing kapal terisi penuh sesuai struktur jabatan operasional.

Kekurangan jumlah Awak Kapal Pengawas yang terjadi saat ini disebabkan oleh adanya personel yang sedang melaksanakan tugas belajar sebagai bagian dari pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan melaksanakan latihan dasar CPNS sebagai persyaratan untuk menjadi PNS. Kondisi tersebut merupakan investasi jangka panjang organisasi guna memastikan tersedianya awak kapal yang profesional, berpengetahuan, dan memiliki kemampuan teknis yang memadai sesuai dengan tuntutan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang semakin kompleks. Meskipun demikian, pengurangan sementara personel ini telah diantisipasi melalui pengaturan jadwal tugas, penyesuaian pola kerja, serta optimalisasi peran awak kapal yang tersedia.

Lebih lanjut, keberhasilan pelaksanaan operasi pengawasan laut meskipun terjadi pengurangan jumlah personel aktif di atas kapal menunjukkan bahwa sistem distribusi dan manajemen personel telah dijalankan secara efektif. Kinerja kapal pengawas tetap dapat diandalkan, dan fungsi pengawasan laut tidak terganggu oleh tugas tambahan yang dijalankan AKP secara paralel. Hal ini juga menunjukkan adanya fleksibilitas struktur kerja di lingkungan Ditjen PSDKP yang memungkinkan mobilisasi SDM secara adaptif sesuai kebutuhan lapangan.

Selain itu, ke depan diperlukan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan kinerja operasional kapal pengawas, antara lain melalui perencanaan kebutuhan

SDM yang lebih adaptif, percepatan proses regenerasi awak kapal, serta peningkatan kompetensi melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan. Evaluasi berkala terhadap distribusi personel juga menjadi penting guna memastikan keseimbangan antara kebutuhan operasional di lapangan dan program pengembangan SDM yang sedang berjalan. Dengan demikian, Ditjen PSDKP dapat terus menjaga efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sekaligus memastikan kesiapan personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis di masa mendatang.

Tabel 22. Target dan Realisasi IKU 7 Periode TW I Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			CAPAIAN 2026			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase ketersediaan Personil Armada Pengawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,5	84,2	108,65 %			-

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi Indeks Kinerja Persentase ketersediaan Personil Armada Pengawasan sebesar 84,2 dari target 77,5 dengan presentase capaian 108,65%. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama di tahun sebelumnya dikarenakan indikator kinerja ini baru ditetapkan pada Triwulan IV pada tahun 2025.

8. Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP

Adapun capaian IKU Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP sampai dengan TW I tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Target dan realisasi IKU 8 pada periode TW I tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			CAPAIAN 2026			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan (Indeks)	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-		

Sampai dengan periode Triwulan I 2026 indikator tersebut belum ada capaian, hal ini dikarenakan kegiatan survey penilaian kondisi teknis kapal pengawas oleh BKL direncanakan baru akan dilaksanakan pada periode Triwulan ke IV atau pada akhir periode Semester II tahun 2026. Meskipun demikian terbuka kemungkinan indikator tersebut akan dapat diukur dan tercapai sebagian pada Triwulan ke III apabila survey penilaian kondisi teknis kapal pengawas dapat dilaksanakan lebih cepat menyesuaikan dengan jadwal pemeliharaan dan perawatan tahunan kapal pengawas.

Tabel. Metode Penilaian dengan *Condition Assessment Programme*

No	Kondisi	CAP Rating	Nilai Teknis	Keterangan
1	Poor (Buruk)	1 – 1,49	0,00% - 50,00%	Kapal membutuhkan perbaikan signifikan pada komponen utama atau keseluruhan sistemnya
2	Unsatisfactory (kurang memuaskan)	1,5 – 1,99	50,00% - 75,00%	Kapal memerlukan perbaikan signifikan pada beberapa komponen agar bisa beroperasi dengan lebih aman
3	Fair (cukup)	2 – 2,49	75,00% - 85,00%	Kapal dalam kondisi teknis yang memadai tetapi masih memerlukan perbaikan atau peningkatan pada beberapa bagian agar dapat beroperasi lebih optimal
4	Good (Baik)	2,49 – 3,49	85,00% - 95,00%	Kapal memiliki kondisi teknis yang baik dengan mayoritas komponen utama berfungsi dengan optimal
5	Very Good (Sangat Baik)	3,5 - 4	95,00% - 100,00%	Kapal memiliki nilai teknis yang sangat baik, dengan seluruh komponen utama dalam kondisi prima dan berfungsi dengan sangat optimal

Selain kegiatan tersebut di atas, pada periode Triwulan I terdapat perencanaan pekerjaan *docking* kapal pengawas yang akan dilaksanakan di 3 (tiga) kapal yaitu KP Barakuda 01, Barakuda 02 dan KP Orca 04. Pekerjaan *docking* ini dilaksanakan dalam rangka menjaga agar armada tetap laik dan siap operasi.

No	Nama Pekerjaan	Waktu	Keterangan
1	Pembahasan <i>Repairlist</i> Docking KP Barakuda 01	25 Februari 2026	Melibatkan dari tim pengadaan barang/jasa
2	Pembahasan <i>Repairlist</i> Docking KP Barakuda 02	26 Februari 2026	Melibatkan dari tim pengadaan barang/jasa
3	Pembahasan <i>Repairlist</i> Docking KP Orca 04	26 Februari 2026	Melibatkan dari tim pengadaan barang/jasa

Alokasi anggaran pada tahun 2026 untuk mendukung tercapainya IKU 10 ini sebesar Rp.212.800.000,00 dan sampai dengan akhir TW I tahun 2026 belum ada realisasi.

9. Persentase Armada Pengawasan SDKP yang Disupervisi Perawatan

Presentase armada pengawasan SDKP yang disupervisi pemeliharaan dan perawatannya adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah armada pengawasan SDKP di UPT lingkup Ditjen PSDKP yang disupervisi pemeliharaan dan perawatannya. Supervisi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dan memastikan bahwa kegiatan pemeliharaan dan perawatan Armada Pengawasan SDKP di UPT lingkup Ditjen PSDKP telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan SOP yang berlaku dengan hasil akhir yang diharapkan yaitu Kapal Pengawas yang Siap/Laik Operasional.

Hasil pelaksanaan supervisi akan dituangkan dalam sebuah laporan hasil supervisi yang memuat informasi tentang evaluasi atas kesesuaian pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas yang telah

diselesaikan oleh UPT dengan pedoman pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas dan Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas.

Pengukuran indikator dilakukan berdasarkan laporan kondisi teknis kapal pengawas dan laporan monitoring kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas oleh UPT Ditjen PSDKP.

1. Laporan Kondisi Teknis Kapal Pengawas

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas, akurat, dan terkini mengenai keadaan teknis kapal sehingga dapat digunakan sebagai dasar ukuran tingkat kelaiklautan kapal, keselamatan operasi, perencanaan pemeliharaan dan perawatan serta menjamin kesiapan operasional kapal pengawas. Kapal pengawas dikatakan “siap” apabila nilai lebih atau sama dengan 75 dan kapal pengawas dikatakan “tidak siap” apabila nilai kurang dari 75. Adapun beberapa komponen yang dinilai sebagai berikut :

- Peralatan navigasi
- Peralatan komunikasi
- Perlengkapan keselamatan dan pemadam kebakaran
- Konstruksi kapal
- Perlengkapan tambat labuh
- Pendingin ruangan
- Mesin utama dan mesin bantu
- Sistem propulsi dan kemudi
- Sistem perpompaan
- Peralatan persenjataan

Sampai dengan Triwulan I ini telah dinilai 15 kapal pengawas dengan rincian 10 kapal pengawas kelas II dan III serta 5 kapal pengawas kelas IV dan V.

Tabel. Lapkonis KP Kelas II dan III (UPT)

No	KP	UPT PSDKP	Nilai
1	Hiu 17	Pangkalan PSDKP Batam	100
2	Hiu Macan Tutul 02	Pangkalan PSDKP Benoa	98
3	Hiu 14	Pangkalan PSDKP Tual	99
4	Hiu 13	Stasiun PSDKP Ambon	99
5	Hiu 01	Stasiun PSDKP Belawan	98
6	Hiu 07	Stasiun PSDKP Tarakan	97
7	Hiu Macan 01	Stasiun PSDKP Pontianak	99.86
8	Hiu Macan 03	Stasiun PSDKP Kupang	95.61
9	Paus 01	Stasiun PSDKP Biak	99
10	Hiu 15	Stasiun PSDKP Tahuna	100
11	Hiu Biru 01	Pangkalan PSDKP Batam	89
12	Hiu Biru 02	Pangkalan PSDKP Batam	89
13	Napoleon 039	Stasiun PSDKP Tahuna	97.5
14	Napoleon 54	Stasiun PSDKP Kupang	73
15	Hiu Biru 04	Stasiun PSDKP Kupang	99

2. Laporan Monitoring Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas

Laporan ini merupakan laporan berkala tentang pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas yang telah dilaksanakan oleh UPT PSDKP. Kegiatan tersebut mencakup :

- perawatan pencegahan seperti perawatan rutin, *docking*, servis, analisis teknis dan pengecekan.
- perawatan prediktif seperti perbaikan mesin, kalibrasi, penggantian plat kapal, suku cadang, perlengkapan kapal, penggantian mesin.
- perawatan darurat seperti perbaikan kerusakan pada sistem permesinan, kelistrikan, propulsi, navigasi dan komunikasi, konstruksi, alat keselamatan dan pemadam kebakaran.

Hal ini bertujuan untuk memastikan kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas di UPT PSDKP dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran dan sesuai dengan perencanaan.

Capaian IKU 9 Nilai Supervisi Penyelesaian Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan sampai dengan TW I tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 23. Target dan realisasi IKU 9 pada periode TW IV tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			CAPAIAN 2026			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Armada Pengawasan SDKP yang Disupervisi Perawatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada Triwulan I belum ada target capaian (%) namun telah dilakukan penilaian terhadap kapal pengawas sebanyak 15 unit. Nilai diperoleh dari hasil supervisi terhadap 15 unit kapal pengawas dengan rincian 10 kapal pengawas kelas II dan III serta 5 kapal pengawas kelas IV dan V.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai target realisasi IKU 11 antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan jadwal supervisi yang tepat dan akurat sesuai kebutuhan.
2. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kapal Pengawas.
3. Metode pelaksanaan supervisi yang efektif dan efisien.
4. Monitoring dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP secara berkala, rutin, dan tepat waktu.

Sedangkan salah satu faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan supervisi dan pencapaian IKU 9 yaitu rendahnya validasi dan verifikasi data hasil supervisi secara online, hal ini disebabkan karena Direktorat POA tidak bisa melakukan validasi dan verifikasi data secara langsung di lapangan sebab tidak tersedianya anggaran.

Alokasi anggaran tahun 2026 untuk mendukung tercapainya IKU 11 ini yaitu sebesar Rp. 6.075.000,00 berupa konsumsi rapat pembahasan kegiatan.

SASARAN KEGIATAN 3

TERSELENGGARANYA PENYUSUNAN NSPK BIDANG OPERASI ARMADA DAN PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA PSDKP

10. Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP

Jumlah rancangan kebijakan pemerintah di bidang Pengawasan SDKP yang disusun lingkup Direktorat POA Tahun 2025 telah terpenuhi. Dengan adanya IKU ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Direktorat POA untuk menstandarkan pelayanan publik Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP).

Tabel 14. Target dan Realisasi IKU 10 Periode TW I Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			CAPAIAN 2026			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian pada TW I tahun 2026 belum ada capaian dikarenakan pengukuran pada IKU Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP dilakukan pada akhir tahun 2026 atau Triwulan IV.

Keberhasilan capaian IKU 10 dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut :

1. Tingginya komitmen Direktur POA dalam pemenuhan regulasi di bidang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP). Hal ini karena pimpinan sangat memahami pentingnya/urgensi keberadaan norma, standar, pedoman dan kriteria dalam menjamin operasional sistem pemantauan SDKP berjalan sesuai kaidah dan standar yang tinggi.
2. Penetapan target NSPK yang menjadi prioritas oleh Direktur POA yang harus diselesaikan.

Alokasi anggaran Tahun 2026 untuk mendukung tercapainya IKU 5 ini sebesar Rp 53.208.000 dan sampai dengan TW I tahun 2026 belum terdapat realisasi.

SASARAN KEGIATAN 4

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, LINCAH DAN AKUNTABEL DALAM PENGAWASAN SDKP

Pencapaian Sasaran Kegiatan 6 diukur dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

11. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada

Profesional ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Kualifikasi [Bobot 25%] yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan penilaian sebagai berikut:

- ◆ Pendidikan: S3 (Nilai 25); S2 (Nilai 20); S1 (Nilai 15); D3 (Nilai 10); DII/DI/SMA (Nilai 5); SMP/SD (Nilai 1)
- Kompetensi [Bobot 40%] yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN

- ◆ dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), dengan penilaian sebagai berikut:

Pejabat Struktural:

DIKLAT PIM: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) DIKLAT 20 JP:

Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)

Pejabat Fungsional Tertentu:

DIKLAT Teknis/Fungsional: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)

DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)

SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)

Pejabat Fungsional Umum/ Staf:

DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 22,5), tidak pernah (nilai 0)

•	ASN Struktural : (Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatpim+Diklat20oj+Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)
•	ASN Fungsional : (Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatfungsional+Diklat20oj+ Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)
•	ASN Staff: (Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklat20oj+ Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)

Tabel 26. Target dan Realisasi IKU 11 Periode TW I Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			CAPAIAN 2026			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sampai dengan periode TW I 2026 belum ada realisasi. Karena pengukuran dilakukan pada periode Triwulan II 2026.

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian pada Triwulan I Tahun 2026, belum ada capaian dikarenakan pengukuran pada IKU Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada dilakukan pada Triwulan II tahun 2026. Upaya peningkatan nilai IP ASN dengan mengarahkan keikutsertaan pada E-Milea KKP dan mengadakan pelatihan teknis terkait lainnya dilakukan agar target tahunan dapat tercapai secara optimal hingga akhir tahun. Adapun target akhir Renstra PSDKP 2025-2029 adalah 81.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Direktur POA sangat fokus dalam hal pemenuhan nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat POA;
2. Kesadaran yang tinggi pegawai Dit POA dalam pengembangan diri yang dilakukan secara daring maupun luring; dan
3. Pemenuhan IP ASN yang menjadi prioritas oleh Direktur POA yang harus diselesaikan.

12. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat POA

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mengamanatkan Instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada masing-masing unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian Pusat/Daerah.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi

SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP.

Tabel 27. Target dan realisasi IKU 12 periode TW I Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			CAPAIAN 2026			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sampai dengan akhir Triwulan I 2026 IKU ini belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV Tahun 2026.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- ◆ Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal capaian nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengendalian Operasi Armada; dan
- ◆ Melakukan penilaian mandiri pada Lembar Kerja Evaluasi, dan memenuhi data dukung yang sudah ditetapkan.

13. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA

- Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan

pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

- Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (IV) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.
- Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Tabel 28. Target dan Realisasi IKU 13 Periode TW I Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			CAPAIAN 2026			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA	-	-	-	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	-	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian pada TW I Tahun 2026 telah berhasil dengan maksimal sesuai target yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada Tahun 2025, capaian relatif sama dengan persentase 100%.

Pada Direktorat POA terdapat 10 (sepuluh) kegiatan yang menjadi prioritas pengendalian berbasis Manajemen Risiko antara lain:

Tabel 29 Daftar Kegiatan yang dikendalikan berbasis Manajemen Risiko

No	RO	DAFTAR KEGIATAN
1	QHD.001	Operasional Kapal Pengawas
2	QHD.002	Operasional Pesawat Patroli
3	RCG.001	Armada Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dirawat
4	BHD.001	Operasional Pengawakan dan Logistik Kapal Pengawas
5	BHD.003	Operasional Tim Pesawat Patroli
6	AEB.001	Forum Operasi Pengawasan serta Intelijen Kelautan dan Perikanan
7	FAE.01	Penjaminan Kualitas Pelaksanaan Operasi Armada
8	AFA. 001.	NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP
9	RDS. 001.	Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional
10	ACA. 001	Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA; dan
2. Pemantauan Pengendalian Manajemen Risiko yang menjadi prioritas oleh Direktur POA yang harus diselesaikan.

14. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan

IKU ini menunjukkan Persentase Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat POA berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP. Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK DJPSDKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 30. Target dan realisasi IKU 14 periode TW I Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			CAPAIAN 2026			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	75	100	133,33	80	90,91	113,63	80	100	125	86	100	116,28	89	-	-

Berdasarkan tabel diatas, Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat POA yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” bila dibandingkan periode yang sama tahun 2025 realisasi capaian sama yaitu 100 %. Hal tersebut dipengaruhi oleh besaran jumlah rekomendasi yang dilengkapi. Namun demikian, capaian tahun 2026 sudah melampau target yang direncanakan. Keberhasilan tersebut, dipengaruhi oleh komitmen pimpinan beserta jajaran dalam menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pengawasan dengan melakukan monitoring bertahap dan konsisten

15. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Direktorat POA

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi :

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau mewakili nilai guna kesejarahan.

Tabel 31. Target dan realisasi IKU 15 periode TW I Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			CAPAIAN 2026			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 4	-

Sampai dengan akhir Triwulan I 2026 IKU ini belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV Tahun 2026.

Keberhasilan dalam mencapai target IKU pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- Komitmen pimpinan dalam mengembangkan SDM Arsiparis Dit POA agar terciptanya Arsiparis yang dinamis.
- Rapat monitoring dan evaluasi rutin setiap bulan;

16. Nilai Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP

Indikator ini merupakan inovasi pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung program peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.7/2021, Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Tabel 32. Target dan realisasi IKU 16 periode TW I Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			CAPAIAN 2026			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada (unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-

Berdasarkan tabel diatas, sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2026, belum ada capaian, pengukuran dilakukan pada Triwulan IV 2026.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam ide/gagasan baru untuk selalu membuat inovasi tahunan agar kinerja menjadi lebih baik dari sebelumnya; dan

2. Melakukan rapat internal untuk pelaksanaan pembuatan inovasi perubahan setiap tahunnya.
3. Melakukan tahapan-tahapan penunjang dalam menggali ide/gagasan agar sesuai dengan kebutuhan.

17. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

Nilai Implementasi Program Budaya Kerja tingkat Ditjen PSDKP diperoleh dari:

- ◆ Rata-rata nilai LKE pelaksanaan Budaya Kerja Seluruh Satker Pusat (5 Satker) dan Satker UPT (14 Satker)
- ◆ Nilai LKE yang digunakan adalah nilai tanpa dikonversi ke persentase
- ◆ Target nilai Satker Pusat minimal 21 yang akan diukur pada Triwulan I 2025

Tabel 34. Rincian target dan realisasi IKU 17 periode TW I Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023			CAPAIAN 2024			CAPAIAN 2025			CAPAIAN 2026			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-

Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2026 IKU ini belum ada realisasi. Pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV Tahun 2026.

Pada Direktorat Pengendalian Operasi Armada sesudah adanya penerapan program budaya kerja telah terjadi perubahan pola pikir dan cara kerja melalui budaya kerja yang diarahkan untuk menghasilkan inovasi pada setiap area perubahan, karena terdapat lingkungan strategis yang berubah menghasilkan terobosan dalam melakukan kegiatan. Langkah implementasi 11 (sebelas) program budaya kerja pada Direktorat Pengendalian Operasi Armada yang mendukung dalam pencapaian IKU Implementasi Budaya Kerja adalah:

- Hasilkan Inovasi Satker (HIU) : Melakukan asistensi kepada untuk menghasilkan inovasi pada lingkup Direktorat Pengendalian Operasi Armada
- Lima Menit Sebelum Jadwal Rapat : Mencantumkan pada surat undangan agar peserta hadir 5 (lima) menit sebelum rapat
- Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5R): Melakukan internalisasi budaya 5R agar ruang kerja lebih rapih
- Upayakan Data Terkini (UPDATE) : Pada saat rapat pimpinan terdapat unit kerja yang menyampaikan paparan dengan menggunakan data pengawasan atau data penangkapan kapal ilegal yang periode lampau, maka dengan adanya program ini tiap pegawai telah melakukan usaha terkini untuk mendapatkan data yang UPDATE.
- Organisasikan Rapat, Catat, Aksi, dan Arsipkan (ORCA) : Pada saat kegiatan temu teknis aparat penegak hukum terdapat agenda yang belum rapi terjadwal, notulen dan pendokumentasian yang masih berantakan, dengan adanya program ORCA kegiatan menjadi lebih komprehensif melalui pencatatan dan pengarsipan notula.
- Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (TAAT) : Dalam pelaksanaan tugas adanya potensi untuk melakukan korupsi, menerima suap, menerima gratifikasi dan mengambil kebijakan yang bertentangan dengan hukum, maka dengan adanya program TAAT ini telah mewujudkan pegawai yang berintegritas tinggi dalam melaksanakan tugas sehingga menjaga nama baik organisasi dan kepercayaan publik
- Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel, dan Amanah (BARRAKUDA) : Pada saat penyusunan anggaran terdapat kesan dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan tidak sesuai ketentuan, maka dengan adanya program BARRAKUDA ini tiap pegawai telah merencanakan anggaran sesuai kaidah perencanaan dan penganggaran sehingga terjadi peningkatan kualitas DIPA dan meminimalisir temuan auditor.

- ASN PSDKP Produktif Kerja (APIK) : Pada saat jam kerja terdapat pegawai yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak fokus, maka dengan adanya program APIK ini setiap pegawai telah bertanggungjawab dan mempunyai akuntabilitas terhadap pekerjaannya dengan meminimalisir hal-hal yang dapat mengganggu fokus kerjanya.
- Menyelesaikan Tugas Dengan Tepat (MANTAP) : Terdapat penyelesaian tugas oleh pegawai atau suatu unit kerja yang terlambat dan tidak tepat waktu, serta mempengaruhi kinerja unit kerja lain, maka dengan adanya program MANTAP ini maka telah tumbuh komitmen kesadaran untuk menghasilkan pekerjaan dengan kualitas tinggi dan diselesaikan secara tepat waktu.
- Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (HARMONIS) : Kurangnya kesadaran dalam memberi penghargaan dan apresiasi mengakibatkan motivasi dan hubungan sesama pegawai menjadi kurang optimal, maka dengan adanya program HARMONIS ini telah mendorong sikap saling menghargai dan apresiasi terhadap kontribusi kerja pegawai sekecil dan sesederhana apapun dalam pelaksanaan tugas. Terdapat apresiasi Sobat PILAR PSDKP bulanan dan tahunan.
- Gelorakan Gerakan Hemat Energi (Go Green) : Lingkungan kerja terdapat penggunaan energi yang boros, penggunaan kertas kerja yang banyak, penggunaan air minum dalam kemasan, maka dengan adanya program Go Green maka tiap pegawai telah timbul kesadaran untuk melakukan efisiensi dalam hal menghemat penggunaan air dan listrik, mematikan peralatan kerja sebelum pulang, dan mengurangi penggunaan kertas dan tinta dalam memproses dokumen kerja.

AKUNTABILITAS

KEUANGAN

A. Realisasi Anggaran

Di bidang anggaran, Direktorat POA sampai dengan TW I tahun 2026 telah melaksanakan 10 Rincian Output (RO) Kegiatan Pengendalian Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan dalam DIPA Satker Direktorat POA, Ditjen PSDKP tahun 2026. Pagu Direktorat POA sebesar Rp 301.623.888.000 (dua ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh empat juga empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Realisasi anggaran Direktorat POA pada TW I Tahun Tahun 2026 sebesar Rp. 44.283.415.159,00 (empat puluh empat miliar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) atau sebesar 14,68% dari Pagu anggaran.

Tabel 35. Rekap Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA TW I Tahun 2026

NO	RINCIAN OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI	%
DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI ARMADA				
1	QHD. 001 Operasional Kapal Pengawas	169.809.930.000	37.563.058.502	22,12
2	QHD. 002. Operasional Pesawat Patroli	82.030.299.000	11.035.425.685	13,45
3	RCG. 001. Armada Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dirawat	34.962.148.000	1.656.206.521	4,74
4	BHD.001 Operasional Pengawakan dan Logistik Kapal Pengawas	6.582.592.000	381.495.281	5,80
5	BHD. 003 Operasional Tim Pesawat Patroli	2.417.157.000	100.308.511	4,15
6	AEB.001 Forum Operasi Pengawasan serta Intelijen Kelautan dan Perikanan	120.191.000	25.771.359	21,44
7	FAE.01 Penjaminan Kualitas Pelaksanaan Operasi Armada	422.830.000	41.805.589	9,89
8	AFA. 001. NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	53.208.000	0	0,00
9	RDS. 001. Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	3.465.766.000	428.909.274	12,38
10	ACA. 001 Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	475.840.000	51.288.595	10,78
TOTAL		300.339.961.000	51.284.269.317	17,08
PERKANTORAN				
11	2355.CAN.001 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	7.500.000	0	0,00
12	2355.EBA.962 Layanan Umum Rumah Tangga Direktorat POA	80.484.000	42.010.665	52,20
13	2355.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat POA	1.165.943.000	235.024.835	20,16
14	2355.EBB.951 Layanan Sarana Internal	30.000.000	0	0,00
TOTAL		1.283.927.000	277.035.500	21,58
TOTAL PAGU TAHUN 2026		301.623.888.000	51.561.304.817	17,09%

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Direktorat Pengendalian Operasi Armada selalu berupaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pada tahun 2026, Direktorat Pengendalian Operasi Armada dinilai cukup efektif dalam menggunakan sumber daya. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian Nilai Kinerja Organisasi Triwulan I sebesar 108,26% (Kriteria: Baik), sedangkan anggaran yang digunakan terealisasi sebesar 17.09%.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengendalian Operasi Armada telah melaksanakan beberapa hal antara lain: (1) memaksimalkan kinerja operasi melalui Pesawat Patroli Udara (*airborne surveillance*) untuk memberikan target operasi terverifikasi. Pola ini dikenal dengan istilah *intercept*. Pola ini memberikan target yang jelas kepada Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan di laut, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak kapal pengawas. (2) melakukan rapat-rapat koordinasi secara virtual sehingga mampu meminimalkan pengeluaran biaya. (3) mengurangi penggunaan kertas dan dokumen tercetak sehingga mampu mengurangi biaya operasional perkantoran.

C. Analisis Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Direktorat Pengendalian Operasi Armada melaksanakan beberapa kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja di tahun 2026 :

- **Aspek Operasi Armada**
Berpartisipasi dalam kegiatan operasi bersama baik dalam dan luar negeri seperti Gannet Ausindo, Patkor Optima Malindo, Operasi Interdiksi BNN, Operasi Bersama Bakamla, Operasi Bersama Pengawasan dan Penindakan Penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL), dan lain lain. Selain itu, pola operasi *integrated surveillance system* (ISS) mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi.
- **Aspek Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP**
Melakukan koordinasi/pengendalian rutin dengan pihak terkait, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kapal pengawas dengan skema PHLN. Selain itu, senantiasa proaktif dalam menyediakan dokumen pendukung dalam proses bukan blokir anggaran.
- **Aspek Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas**
Optimalisasi penggunaan teknologi dalam memenuhi dan melakukan monitoring penggunaan logistik kapal pengawas. Hal tersebut mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan.

- **Aspek Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP**
Pada tahun 2026, akan dilaksanakan penilaian kondisi sarana pengawasan SDKP oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) untuk mengetahui kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan, untuk itu Direktorat POA telah menyiapkan rencana pelaksanaan penilaian. Selain itu, optimalisasi peran Port Engineer (PE) dan melakukan evaluasi kinerjanya. Peran PE diharapkan mampu memberikan deteksi dini terkait kerusakan kapal pengawas dan transfer pengetahuan dalam konteks pemeliharaan kapal pengawas secara tepat untuk meminimalisir kerusakan yang lebih fatal.
- **Aspek Sistem dan Informasi Intelijen SDKP**
Pengembangan sistem pemantauan SDKP secara berkesinambungan dan peningkatan pemahaman pengguna aplikasi melalui Bimtek dapat meningkatkan keandalan operasional sistem pemantauan SDKP dalam memberikan data dan informasi.
- **POA Virtual Class**
Direktorat Pengendalian Operasi Armada secara berkesinambungan melaksanakan POA Virtual Class berupa inhouse training secara daring maupun luring dalam rangka meningkatkan kapasitas personel serta sharing knowledge untuk meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

A man in a military uniform, wearing a dark blue beret with a gold emblem and a camouflage uniform, is speaking into a microphone. He is wearing a watch on his left wrist and a ring on his right hand. The background shows a body of water and a forested hill under a clear sky. The text "BAB 4." is overlaid on the right side of the image.

BAB 4.

A. Kesimpulan

- 1. Nilai capaian kinerja rata-rata Direktorat POA periode TW I Tahun 2026 sebesar 108,26% dengan realisasi anggaran yang digunakan dalam mencapai kinerja tersebut, yaitu sebesar Rp 51.561.304.817 (17,09%).
- 2. Jumlah Indikator Kinerja Direktorat POA tahun 2026 adalah sejumlah 17 indikator kinerja. Dari target 17 Indikator Kinerja tersebut, sejumlah 7 diukur pada Triwulan I 2026. Dari 7 IKU yang diukur, sebanyak 2 IKU tercapai 100% dan 5 IKU tercapai lebih dari 100%.
- 3. Pada TW I tahun 2026 mengalami peningkatan sebesar 3,74% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Keberhasilan tersebut merupakan bukti Direktorat Pengendalian Operasi Armada selalu berupaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan analisis data yang disajikan pada Laporan Kinerja Direktorat POA periode Triwulan I tahun 2026, telah berjalan dalam rel yang benar. Hanya saja tentu masih perlu penyempurnaan pada periode Triwulan II 2026. Beberapa hal yang perlu menjadi rekomendasi dalam rangka pelaksanaan penyusunan kinerja TW I tahun 2026, yakni sebagai berikut:

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
Memastikan seluruh Indikator Kinerja lingkup Direktorat POA tercapai sesuai target yang ditetapkan khususnya untuk kinerja yang pengukurannya di akhir tahun	Konsisten melakukan evaluasi secara berkala melibatkan penanggungjawab IKU pada level Tim Kerja lingkup Direktorat POA
Memaksimalkan alokasi anggaran non blokir untuk menunjang kegiatan pengendalian operasi armada	Melaksanakan evaluasi rencana aksi pencapaian kinerja Direktorat POA secara berkala

LAMPIRAN

NKO Juni - 2025

Unit Kerja : DIREKTORAT PENGENDALIAN OPERASI ARMADA

Skor Kinerja : 107.51

• Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓

• Jika masih terdapat tanda ✕, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara klik tombol ➕

• Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih tetap ditambahkan dengan cara klik tombol Tambah Data Dukung➕

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target Juni	Capaian Juni	%	Target s/d Juni	Capaian s/d Juni	%	Tgl Input
SK.01	Terseleenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan secara efektif											
IKSK.1	Tingkat kualitas pemahaman peserta sosialisai penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan Tambah Data Dukung➕	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	60,00	0,00			0,00	0,00		14-Jul-2025 14:16
SK.02	Terseleenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif											
SK.03	Terseleenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi											
IKSK.03.1	Persentase cakupan pemantauan SDKP di WPP NRI Data Dukung1 ✓ ➕ Tambah Data Dukung➕	%	Maximize	Rata-rata	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	100,00	14-Jul-2025 14:16
IKSK.03.2	Indeks Pengelolaan Sistem Pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP Data Dukung1 ✓ ➕ Tambah Data Dukung➕	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	62,00	40,00	48,33	120,00	40,00	48,33	120,00	14-Jul-2025 14:16
IKSK.03.3	Indeks kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan Data Dukung1 ✓ ➕ Tambah Data Dukung➕	Indeks	Maximize	Rata-rata	62,00	62,00	95,26	116,16	164,00	190,55	116,19	14-Jul-2025 14:16
IKSK.03.4	Persentase penyelesaian rancangan NS/PK bidang Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Data Dukung1 ✓ ➕ Data Dukung2 ✓ ➕ Tambah Data Dukung➕ Data Dukung3 📄 Data Dukung4 📄	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00	100,00	120,00	0,00	100,00	120,00	14-Jul-2025 14:16
SK.04	Terseleenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif											
IKSK.04.1	Indeks operasi kapal pengawas Tambah Data Dukung➕	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	52,00	0,00			0,00	0,00		14-Jul-2025 14:16
IKSK.04.2	Indeks operasi pesawat patroli Data Dukung1 ✓ ➕ Tambah Data Dukung➕ Data Dukung2 📄	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95,00	91,00	98,24	107,96	91,00	98,24	107,96	14-Jul-2025 14:16
IKSK.04.3	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas Data Dukung1 ✓ ➕ Tambah Data Dukung➕ Data Dukung2 📄	%	Maximize	Rata-rata	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	100,00	14-Jul-2025 14:16
IKSK.04.4	Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas Tambah Data Dukung➕	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	60,00	0,00			0,00	0,00		14-Jul-2025 14:16
SK.05	Terseleenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan											
IKSK.05.2	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP Tambah Data Dukung➕	Indeks	Maximize	Rata-rata	100,00	0,00			0,00	0,00		14-Jul-2025 14:16
IKSK.05.3	Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP Data Dukung1 ✓ ➕ Tambah Data Dukung➕ Data Dukung2 📄	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	35,00	36,66	104,71	35,00	36,66	104,71	14-Jul-2025 14:16
SK.06	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan											
IKSK.06.1	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat POA Tambah Data Dukung➕	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95,00	0,00			0,00	0,00		14-Jul-2025 14:16
IKSK.06.2	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Direktorat POA Tambah Data Dukung➕ Data Dukung1 📄 Data Dukung2 📄	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	74,00	85,37	115,36	74,00	85,37	115,36	14-Jul-2025 14:16
IKSK.06.3	Nilai PM SAKOP Satker lingkup Ditjen PSDKP Tambah Data Dukung➕	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	66,00	0,00			0,00	0,00		14-Jul-2025 14:16
IKSK.06.4	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP Tambah Data Dukung➕ Data Dukung1 📄	%	Maximize	Rata-rata	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	100,00	14-Jul-2025 14:16
IKSK.06.5	Nilai Pengawasan Keasrian Internal unit Kerja lingkup Setditjen PSDKP Tambah Data Dukung➕	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	60,00	0,00			0,00	0,00		14-Jul-2025 14:16
IKSK.06.6	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan Data Dukung1 ✓ ➕ Tambah Data Dukung➕ Data Dukung2 📄	%	Maximize	Rata-rata	95,00	95,00	100,00	105,26	190,00	195,00	102,63	14-Jul-2025 14:16
IKSK.06.7	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Direktorat POA Tambah Data Dukung➕	Inovasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	0,00			0,00	0,00		14-Jul-2025 14:16
IKSK.06.8	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Direktorat POA Tambah Data Dukung➕	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	60,00	0,00			0,00	0,00		14-Jul-2025 14:16
IKSK.06.9	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Tambah Data Dukung➕	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	0,00			0,00	0,00		14-Jul-2025 14:16

Tutup

Lampiran 2. Memo penyampaian capaian kinerja Katimja PSIIK periode triwulan I 2026

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOTA DINAS
NOMOR: 839/DJPSPDKP.3/TU.140/IV/2026

Yth. : Direktur Pengendalian Operasi Armada
Dari : Ketua Tim Kerja Pelayanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Capaian IKU Triwulan I Tahun 2026
Tanggal : 10 April 2026

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pada Tim Kerja Pelayanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan periode Triwulan I Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Utama di bidang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan SDKP yang Akurat dan Terintegrasi sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TRIWULAN I		
			TAHUN 2026	TARGET	REALISASI CAPAIAN	CAPAIAN %
1	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat dan terintegrasi	2 Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	83	83	93.71	112.90

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak Direktur lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

M. Ardi Partadisastra

Lampiran 3. Perhitungan persentase cakupan WPPNRI yang dipantau pemanfaatan SDKP Triwulan I 2026

**PERHITUNGAN CAPAIAN IKU PERSENTASE CAKUPAN PEMANTAUAN
SDKP DI WPP NRI TRIWULAN I TAHUN 2026**

No	WPP	Bulan			Perhitungan (%)
		Jan	Feb	Mar	
1	WPPNRI 571	1	1	1	100
2	WPPNRI 572	1	1	1	100
3	WPPNRI 573	1	1	1	100
4	WPPNRI 711	1	1	1	100
5	WPPNRI 712	1	1	1	100
6	WPPNRI 713	1	1	1	100
7	WPPNRI 714	1	1	1	100
8	WPPNRI 715	1	1	1	100
9	WPPNRI 716	1	1	1	100
10	WPPNRI 717	1	1	1	100
11	WPPNRI 718	1	1	1	100
PERSENTASE					100
					100
					100%

Lampiran 5. Rincian Target dan Realisasi Capaian Kinerja Indeks Operasi Pesawat Patroli periode Triwulan I 2026

**Target dan Realisasi Capaian Kinerja lingkup
Subdirektorat Operasi Kapal Pengawas Dan Pesawat Patroli
Periode Triwulan I Tahun 2026**

No	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW I	Capaian TW I	%
1	Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli (indeks)	95,25	70	78,78	112,54
2	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks)	92,25	89	91,27	102,55

Lampiran 7. Hasil Penilaian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOTA DINAS
NOMOR : 837/DJPSDKP.1/OT.710/IV/2026

Yth. : 1. Direktur Lingkup Ditjen PSDKP
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Ditjen PSDKP
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Persentase Capaian Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis
Manajemen Risiko Triwulan I Tahun 2026 Lingkup Ditjen. PSDKP
Tanggal : 13 April 2026

Bersama ini disampaikan Persentase Capaian Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Triwulan I Tahun 2026 Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP sebagaimana terlampir, sebagai realisasi atas rencana yang telah disusun dalam Form Identifikasi Risiko Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Saiful Umam

Tembusan:
Direktur Jenderal PSDKP

BAB II

HASIL PENILAIAN

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah dilaksanakan oleh seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP dengan Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan. Berikut Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko dengan hasil pada Tabel. 1 berikut:

No	Satker	Rencana Pengendalian Risiko	Realisasi Pengendalian Risiko	Persentase Capaian IKU MR
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	1	1	100%
	Direktorat POA	15	15	100%
	Direktorat PSP	7	7	100%
	Direktorat PPSDP	6	6	100%
	Direktorat PPSDK	7	7	100%
	Direktorat PP	4	4	100%
2	Pangkalan PSDKP Lampulo	7	7	100%
3	Pangkalan PSDKP Batam	9	9	100%
4	Pangkalan PSDKP Jakarta	10	10	100%
5	Pangkalan PSDKP Benoa	8	8	100%
6	Pangkalan PSDKP Bitung	15	15	100%
7	Pangkalan PSDKP Tual	15	15	100%
8	Stasiun PSDKP Belawan	11	11	100%
9	Stasiun PSDKP Cilacap	8	8	100%
10	Stasiun PSDKP Kupang	3	3	100%
11	Stasiun PSDKP Pontianak	14	14	100%
12	Stasiun PSDKP Tarakan	11	11	100%
13	Stasiun PSDKP Tahuna	3	3	100%
14	Stasiun PSDKP Ambon	9	9	100%
15	Stasiun PSDKP Biak	7	7	100%
Total		170	170	100%

Lampiran 8. Data dukung IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PSDKP periode Triwulan I 2026

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOTA DINAS
NOMOR 846/DJPSDKP.1/TU.140/IV/2026

Yth : 1. Direktur lingkup Ditjen PSDKP
2. Kepala UPT lingkup Ditjen PSDKP
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Penyampaian Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Lingkup Ditjen PSDKP periode Triwulan I Tahun 2026
Tanggal : 14 April 2026

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, bersama ini disampaikan data capaian Indikator Kinerja "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PSDKP Periode Triwulan I Tahun 2026" sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang terbit periode 1 Oktober 2025 s.d. 31 Desember 2025 (Triwulan IV Tahun 2025) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh Satker Lingkup Ditjen PSDKP sampai dengan 31 Maret Tahun 2026 (Triwulan I 2026).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Ditjen PSDKP yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode Triwulan I Tahun 2026 sebesar 100% (tuntas 73 dari 73 rekomendasi).
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing unit kerja periode Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana disajikan pada lampiran.
4. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas kerja sama, komitmen, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh seluruh satuan kerja di lingkup Ditjen PSDKP sehingga Ditjen PSDKP dapat menyelesaikan seluruh rekomendasi yang diberikan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Saiful Umam

Tembusan:
Direktur Jenderal PSDKP